



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.513, 2014

KEMENKUMHAM. Jabatan. Kelas Jabatan.  
Struktural. Fungsional.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2014  
TENTANG  
JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan jabatan dan kelas jabatan sebagai bentuk pelaksanaan reformasi birokrasi, perlu adanya pengaturan kembali kelas jabatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - b. bahwa untuk memperkuat landasan hukum dalam penetapan kelas jabatan, pengaturan kelas jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.KP.08.01 Tahun 2011 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Serta Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu diganti dengan peraturan yang baru;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai lain yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
3. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan

tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri, yang pengangkatan dalam jabatan tersebut dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.

4. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri, yang pengangkatan dalam jabatan tersebut dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
5. Kelas Jabatan adalah penggolongan jabatan berdasarkan sifat, jenis, dan beban pekerjaan serta besaran tunjangan kinerja.
6. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## BAB II

### JABATAN DAN KELAS JABATAN

#### Pasal 2

- (1) Pegawai wajib melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Jabatan Struktural;
  - b. Jabatan Fungsional Tertentu; dan
  - c. Jabatan Fungsional Umum.
- (3) Selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga terdapat jabatan lainnya di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### Pasal 3

- (1) Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki Kelas Jabatan.
- (2) Daftar nama Jabatan dan Kelas Jabatan untuk Jabatan Struktural tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Daftar nama Jabatan dan Kelas Jabatan untuk Jabatan Fungsional Tertentu tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Daftar nama Jabatan dan Kelas Jabatan untuk Jabatan Fungsional Umum dan jabatan lainnya tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 4

- (1) Kelas Jabatan bagi Pejabat Struktural didasarkan pada keputusan tentang pengangkatan dan alih tugas dalam dan dari Jabatan Struktural.
- (2) Kelas Jabatan bagi Pejabat Fungsional Tertentu didasarkan pada:
  - a. keputusan tentang pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Tertentu; atau
  - b. keputusan tentang kenaikan jenjang dalam Jabatan Fungsional Tertentu.
- (3) Kelas Jabatan bagi Pejabat Fungsional Umum didasarkan pada keputusan tentang penetapan Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai dalam Jabatan Fungsional Umum.

## BAB III

## TUNJANGAN KINERJA

## Pasal 5

Pegawai selain berhak menerima penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan juga dapat diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulannya.

## Pasal 6

- (1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada Pegawai berdasarkan Kelas Jabatan.
- (2) Besarnya tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7

Ketentuan teknis pemberian tunjangan kinerja dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## BAB IV

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 8

Besarnya tunjangan kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.KP.08.01 Tahun 2011 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Serta Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia masih tetap berlaku sepanjang belum diubah atau diganti dengan Peraturan Menteri yang baru.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.KP.08.01 Tahun 2011 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Serta Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 April 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 April 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 7 TAHUN  
 TENTANG  
 KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM  
 DAN HAK ASASI MANUSIA

DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL DAN KELAS JABATAN  
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

No.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN
1	SEKRETARIS JENDERAL	17
2	KEPALA BIRO PERENCANAAN	15
3	KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN TELEMATIKA	12
4	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN FASILITASI TELEMATIKA	9
5	KEPALA SUBBAGIAN STANDARDISASI TELEMATIKA	9
6	KEPALA SUBBAGIAN DATA DAN INFORMASI	9
7	KEPALA SUBBAGIAN PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN TELEMATIKA	9
8	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN	12
9	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN I	9
10	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN II	9
11	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN III	9
12	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN IV	9
13	KEPALA BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	12
14	KEPALA SUBBAGIAN PEMANTAUAN ANALISA DAN PELAPORAN I	9
15	KEPALA SUBBAGIAN PEMANTAUAN ANALISA DAN PELAPORAN II	9
16	KEPALA SUBBAGIAN PEMANTAUAN ANALISA DAN PELAPORAN III	9
17	KEPALA SUBBAGIAN PEMANTAUAN ANALISA DAN PELAPORAN IV	9
18	KEPALA BAGIAN KELEMBAGAAN	12
19	KEPALA SUBBAGIAN ORGANISASI I	9
20	KEPALA SUBBAGIAN ORGANISASI II	9
21	KEPALA SUBBAGIAN ORGANISASI III	9
22	KEPALA BAGIAN TATALAKSANA	12
23	KEPALA SUBBAGIAN STANDARDISASI SARANA KERJA	9
24	KEPALA SUBBAGIAN SISTEM, PROSEDUR DAN METODA	9
25	KEPALA SUBBAGIAN ANALISA TATA LAKSANA	9
26	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO	9
27	KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN	15
28	KEPALA BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN	12
29	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN FORMASI DAN PENGADAAN PEGAWAI	9
30	KEPALA SUBBAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9

31	KEPALA SUBBAGIAN JAMINAN SOSIAL	9
32	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO	9
33	KEPALA BAGIAN PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI	12
34	KEPALA SUBBAGIAN ANALISA KEBUTUHAN PENGEMBANGAN PEGAWAI	9
35	KEPALA SUBBAGIAN ANALISA KEBUTUHAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN LUAR NEGERI	9
36	KEPALA SUBBAGIAN SELEKSI PENGEMBANGAN PEGAWAI	9
37	KEPALA BAGIAN MUTASI PEGAWAI	12
38	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI I	9
39	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI II	9
40	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI III	9
41	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI IV	9
42	KEPALA BAGIAN PEMBERHENTIAN, PENSIUN DAN DISIPLIN PEGAWAI	12
43	KEPALA SUBBAGIAN PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN I	9
44	KEPALA SUBBAGIAN PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN II	9
45	KEPALA SUBBAGIAN PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN III	9
46	KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI DISIPLIN PEGAWAI	9
47	KEPALA BAGIAN TATA USAHA KEPEGAWAIAN	12
48	KEPALA SUBBAGIAN TATA NASKAH I	9
49	KEPALA SUBBAGIAN TATA NASKAH II	9
50	KEPALA SUBBAGIAN PENGGANDAAN I	9
51	KEPALA SUBBAGIAN PENGGANDAAN II	9
52	KEPALA BIRO KEUANGAN	15
53	KEPALA BAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	12
54	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN I	9
55	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN II	9
56	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN III	9
57	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN IV	9
58	KEPALA BAGIAN PERBENDAHARAAN DAN TATA USAHA KEUANGAN	12
59	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN	9
60	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA KEUANGAN	9
61	KEPALA SUBBAGIAN KERUGIAN NEGARA	9
62	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO	9
63	KEPALA BAGIAN PENGUJIAN DOKUMEN DAN PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR	12
64	KEPALA SUBBAGIAN PENGUJIAN DAN PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR I	9
65	KEPALA SUBBAGIAN PENGUJIAN DAN PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR II	9
66	KEPALA SUBBAGIAN PENGUJIAN DAN PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR III	9
67	KEPALA SUBBAGIAN PENGUJIAN DAN PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR IV	9
68	KEPALA BAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN	12
69	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN I	9
70	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN II	9
71	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN III	9
72	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN IV	9
73	KEPALA BIRO PERLENGKAPAN	15
74	KEPALA BAGIAN ANALISA KEBUTUHAN	12
75	KEPALA SUBBAGIAN PENYEDIAAN DATA	9

76	KEPALA SUBBAGIAN PEMBAKUAN	9
77	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO	9
78	KEPALA BAGIAN PENGADAAN	12
79	KEPALA SUBBAGIAN HARGA DAN MUTU	9
80	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN PENGADAAN	9
81	KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN PENGADAAN	9
82	KEPALA BAGIAN PENYIMPANAN DAN PENYALURAN	12
83	KEPALA SUBBAGIAN PENYIMPANAN	9
84	KEPALA SUBBAGIAN PENYALURAN	9
85	KEPALA SUBBAGIAN PEMELIHARAAN	9
86	KEPALA BAGIAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA	12
87	KEPALA SUBBAGIAN PEMBUKUAN	9
88	KEPALA SUBBAGIAN INVENTARISASI	9
89	KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA	9
90	KEPALA BAGIAN PENGHAPUSAN	12
91	KEPALA SUBBAGIAN PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA	9
92	KEPALA SUBBAGIAN PENETAPAN STATUS BARANG MILIK NEGARA	9
93	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA	9
94	KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI	15
95	KEPALA BAGIAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	12
96	KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN LEMBAGA PEMERINTAH DAN NEGARA	9
97	KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	9
98	KEPALA BAGIAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	12
99	KEPALA SUBBAGIAN PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN BERITA	9
100	KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN PERS DAN MEDIA MASSA	9
101	KEPALA SUBBAGIAN DOKUMENTASI DAN PERPUSTAKAAN	9
102	KEPALA BAGIAN KERJA SAMA LUAR NEGERI	12
103	KEPALA SUBBAGIAN KERJA SAMA BADAN-BADAN INTERNASIONAL	9
104	KEPALA SUBBAGIAN KERJA SAMA ANTAR NEGARA	9
105	KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	9
106	KEPALA BAGIAN FASILITASI DAN PENGADUAN MASALAH HUKUM	12
107	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI DAN DUKUNGAN TEKNIS MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS	9
108	KEPALA SUBBAGIAN PENGADUAN MASALAH HUKUM	9
109	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO	9
110	KEPALA BIRO UMUM	15
111	KEPALA BAGIAN TATA USAHA KEMENTERIAN	12
112	KEPALA SUBBAGIAN PERSURATAN	9
113	KEPALA SUBBAGIAN PEMBIMBINGAN DAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS	9
114	KEPALA SUBBAGIAN PENYIMPANAN DAN LAYANAN ARSIP INAKTIF	9
115	KEPALA BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN	12
116	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA MENTERI	9
117	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA SEKRETARIS JENDERAL	9



118	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA STAF AHLI DAN STAF KHUSUS MENTERI	9
119	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA WAKIL MENTERI	9
120	KEPALA BAGIAN BINA SIKAP MENTAL	12
121	KEPALA SUBBAGIAN KESEJAHTERAAN	9
122	KEPALA SUBBAGIAN BIMBINGAN ROHANI PEGAWAI	9
123	KEPALA SUBBAGIAN PELAYANAN KESEHATAN PEGAWAI	9
124	KEPALA BAGIAN RUMAH TANGGA	12
125	KEPALA SUBBAGIAN URUSAN DALAM	9
126	KEPALA SUBBAGIAN KENDARAAN DAN PERJALANAN DINAS	9
127	KEPALA SUBBAGIAN GAJI DAN TUNJANGAN KINERJA	9
128	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO	9
129	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN PENGAMANAN	12
130	KEPALA SUBBAGIAN ACARA DAN TAMU PIMPINAN	9
131	KEPALA SUBBAGIAN KEPROTOKOLAN	9
132	KEPALA SUBBAGIAN PENGAMANAN PIMPINAN	9
133	KEPALA SUBBAGIAN PENGAMANAN LINGKUNGAN, INSTALASI, DOKUMEN, DAN JALUR INFORMASI	9
134	KEPALA PUSAT PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN	15
135	KEPALA BAGIAN UMUM	12
136	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN	9
137	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN	9
138	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	9
139	KEPALA BIDANG PROGRAM DAN PELAPORAN	12
140	KEPALA SUBBIDANG PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN	9
141	KEPALA SUBBIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN	9
142	KEPALA BIDANG PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN	12
143	KEPALA SUBBIDANG PENGAJIAN DAN ANALISA KEBIJAKAN	9
144	KEPALA SUBBIDANG PENGEMBANGAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN	9
145	KEPALA SUBBIDANG DOKUMENTASI DAN PERPUSTAKAAN	9
146	INSPEKTUR JENDERAL	17
147	SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL	15
148	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	12
149	KEPALA SUBBAGIAN DATA DAN INFORMASI	9
150	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN	9
151	KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	9
152	KEPALA BAGIAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN I	12
153	KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS LAPORAN HASIL PENGAWASAN I.1	9
154	KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS LAPORAN HASIL PENGAWASAN I.2	9
155	KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS LAPORAN HASIL PENGAWASAN I.3	9
156	KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS LAPORAN HASIL PENGAWASAN I.4	9
157	KEPALA BAGIAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN II	12
158	KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS LAPORAN HASIL PENGAWASAN II.1	9
159	KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS LAPORAN HASIL PENGAWASAN II.2	9

160	KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS LAPORAN HASIL PENGAWASAN II.3	9
161	KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS LAPORAN HASIL PENGAWASAN II.4	9
162	KEPALA BAGIAN UMUM	12
163	KEPALA SUBBAGIAN PERSURATAN	9
164	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN	9
165	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	9
166	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	9
167	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	12
168	KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN	9
169	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI DAN PROMOSI	9
170	KEPALA SUBBAGIAN PENGEMBANGAN PEGAWAI	9
171	INSPEKTUR WILAYAH I	15
172	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT WILAYAH I	9
173	INSPEKTUR WILAYAH II	15
174	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT WILAYAH II	9
175	INSPEKTUR WILAYAH III	15
176	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT WILAYAH III	9
177	INSPEKTUR WILAYAH IV	15
178	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT WILAYAH IV	9
179	INSPEKTUR WILAYAH V	15
180	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT WILAYAH V	9
181	INSPEKTUR WILAYAH VI	15
182	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT WILAYAH VI	9
183	DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI	17
184	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	15
185	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	12
186	KEPALA SUBBAGIAN DATA DAN INFORMASI	9
187	KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN LAPORAN	9
188	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN	9
189	KEPALA SUBBAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9
190	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	12
191	KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN	9
192	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI DAN ADMINISTRASI JABATAN	9
193	KEPALA SUBBAGIAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERHENTIAN	9
194	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	12
195	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	9
196	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN	9
197	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN	9
198	KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN RUMAH TANGGA	12
199	KEPALA SUBBAGIAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA	9
200	KEPALA SUBBAGIAN PENYIMPANAN DAN PENYALURAN BARANG MILIK NEGARA	9
201	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA	9
202	KEPALA SUBBAGIAN PENILAIAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA	9
203	KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TATA USAHA	12

204	KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT	9
205	KEPALA SUBBAGIAN TATA PERSURATAN, DOKUMENTASI DAN KEPUSTAKAAN	9
206	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL	9
207	DIREKTUR DOKUMEN PERJALANAN VISA DAN FASILITAS KEIMIGRASIAN	15
208	KEPALA SUBDIREKTORAT SURAT PERJALANAN	12
209	KEPALA SEKSI PELAYANAN PASPOR BIASA	9
210	KEPALA SEKSI ANALISA PEMBERIAN PASPOR BIASA	9
211	KEPALA SUBDIREKTORAT SURAT PERJALANAN KHUSUS TENAGA KERJA INDONESIA	12
212	KEPALA SEKSI PELAYANAN PASPOR TENAGA KERJA INDONESIA	9
213	KEPALA SEKSI ANALISA PEMBERIAN PASPOR TENAGA KERJA INDONESIA	9
214	KEPALA SUBDIREKTORAT VISA	12
215	KEPALA SEKSI VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN	9
216	KEPALA SEKSI VISA KUNJUNGAN	9
217	KEPALA SEKSI VISA TINGGAL TERBATAS	9
218	KEPALA SEKSI VISA UNTUK NEGARA TERTENTU	9
219	KEPALA SUBDIREKTORAT IZIN MASUK, BERTOLAK DAN TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI	12
220	KEPALA SEKSI IZIN MASUK	9
221	KEPALA SEKSI IZIN BERTOLAK	9
222	KEPALA SEKSI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI DAN POS LINTAS BATAS	9
223	KEPALA SUBDIREKTORAT FASILITAS KEIMIGRASIAN	12
224	KEPALA SEKSI LAYANAN KEAGAMAAN	9
225	KEPALA SEKSI LAYANAN PENDARATAN DI ATAS ALAT ANGKUT	9
226	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
227	DIREKTUR IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN	15
228	KEPALA SUBDIREKTORAT IZIN TINGGAL	12
229	KEPALA SEKSI IZIN TINGGAL KUNJUNGAN	9
230	KEPALA SEKSI IZIN TINGGAL TERBATAS	9
231	KEPALA SEKSI IZIN TINGGAL TETAP	9
232	KEPALA SEKSI IZIN TINGGAL KHUSUS DAN DARURAT	9
233	KEPALA SUBDIREKTORAT ALIH STATUS KEIMIGRASIAN	12
234	KEPALA SEKSI ALIH STATUS IZIN TINGGAL TERBATAS	9
235	KEPALA SEKSI ALIH STATUS IZIN TINGGAL TETAP	9
236	KEPALA SUBDIREKTORAT PENELAHAHAN STATUS KEIMIGRASIAN DAN KEWARGANEGARAAN	12
237	KEPALA SEKSI PENELAHAHAN STATUS KEIMIGRASIAN	9
238	KEPALA SEKSI SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN	9
239	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	9
240	DIREKTUR INTELIJEN KEIMIGRASIAN	15
241	KEPALA SUBDIREKTORAT OPERASI INTELIJEN KEIMIGRASIAN	12
242	KEPALA SEKSI PENGAWASAN ORANG ASING	9
243	KEPALA SEKSI OPERASI KEWILAYAHAN	9
244	KEPALA SEKSI PENGALANGAN	9
245	KEPALA SUBDIREKTORAT PRODUKSI INTELIJEN KEIMIGRASIAN	12

246	KEPALA SEKSI LABORATORIUM FORENSIK KEIMIGRASIAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI INTELIJEN	9
247	KEPALA SEKSI PRODUKSI PERKIRAAN INTELIJEN	9
248	KEPALA SEKSI PRODUKSI KEGIATAN INTELIJEN	9
249	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA INTELIJEN KEIMIGRASIAN	12
250	KEPALA SEKSI KERJA SAMA LEMBAGA INTELIJEN	9
251	KEPALA SEKSI BIMBINGAN JARINGAN NON LEMBAGA	9
252	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGAMANAN PERIZINAN KEIMIGRASIAN	12
253	KEPALA SEKSI PENGAMANAN KANTOR DAN INSTALASI VITAL	9
254	KEPALA SEKSI PENGAMANAN PERSONIL, MATERIAL DAN DOKUMEN	9
255	KEPALA SEKSI PENGAMANAN PERIZINAN	9
256	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	9
257	DIREKTUR PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	15
258	KEPALA SUBDIREKTORAT PENYIDIKAN KEIMIGRASIAN	12
259	KEPALA SEKSI PENYIDIKAN WILAYAH I	9
260	KEPALA SEKSI PENYIDIKAN WILAYAH II	9
261	KEPALA SEKSI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL	9
262	KEPALA SUBDIREKTORAT PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	12
263	KEPALA SEKSI PENINDAKAN WILAYAH I	9
264	KEPALA SEKSI PENINDAKAN WILAYAH II	9
265	KEPALA SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN	12
266	KEPALA SEKSI PENCEGAHAN	9
267	KEPALA SEKSI PENANGKALAN	9
268	KEPALA SUBDIREKTORAT DETENSI IMIGRASI DAN DEPORTASI	12
269	KEPALA SEKSI DETENSI IMIGRASI	9
270	KEPALA SEKSI DEPORTASI	9
271	KEPALA SEKSI IMIGRAN ILEGAL	9
272	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	9
273	DIREKTUR LINTAS BATAS DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI KEIMIGRASIAN	15
274	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA PERBATASAN	12
275	KEPALA SEKSI KERJA SAMA PERBATASAN MALAYSIA DAN PHILIPINA	9
276	KEPALA SEKSI KERJA SAMA PERBATASAN SINGAPURA, PAPUA NEW GUINEA DAN TIMOR LESTE	9
277	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJASAMA ORGANISASI INTERNASIONAL	12
278	KEPALA SEKSI KERJA SAMA ORGANISASI INTERNASIONAL PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA	9
279	KEPALA SEKSI KERJA SAMA ORGANISASI INTERNASIONAL NON PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA	9
280	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJASAMA ANTAR NEGARA	12
281	KEPALA SEKSI KERJASAMA BILATERAL	9
282	KEPALA SEKSI KERJASAMA MULTILATERAL	9
283	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA PERWAKILAN	12
284	KEPALA SEKSI KERJA SAMA PERWAKILAN ASING	9
285	KEPALA SEKSI KERJA SAMA PERWAKILAN AMERIKA DAN EROPA	9
286	KEPALA SEKSI KERJA SAMA PERWAKILAN ASIA PASIFIK DAN AFRIKA	9

287	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	9
288	DIREKTUR SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KEIMIGRASIAN	15
289	KEPALA SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DAN PENGAMANAN	12
290	KEPALA SEKSI PERENCANAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEIMIGRASIAN	9
291	KEPALA SEKSI PENGAMANAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEIMIGRASIAN	9
292	KEPALA SEKSI BIMBINGAN TEKNIS DAN DOKUMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEIMIGRASIAN	9
293	KEPALA SUBDIREKTORAT PELAPORAN DAN PEMELIHARAAN	12
294	KEPALA SEKSI PELAPORAN	9
295	KEPALA SEKSI PELAYANAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEIMIGRASIAN	9
296	KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEIMIGRASIAN	9
297	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENYEBARAN INFORMASI KEIMIGRASIAN	12
298	KEPALA SEKSI KERJA SAMA TEKNOLOGI INFORMASI	9
299	KEPALA SEKSI PENYEBARAN INFORMASI KEIMIGRASIAN	9
300	KEPALA SUBDIREKTORAT DOKUMEN KEIMIGRASIAN DAN KARTU ELEKTRONIK	12
301	KEPALA SEKSI REGISTRASI DAN DISTRIBUSI DOKUMEN	9
302	KEPALA SEKSI PELAYANAN KARTU ELEKTRONIK	9
303	KEPALA SEKSI PEMANTAUAN KUALITAS DAN PENGGUNAAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN	9
304	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	9
305	DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN	17
306	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	15
307	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	12
308	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN	9
309	KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	9
310	KEPALA SUBBAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ORGANISASI	9
311	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	12
312	KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN	9
313	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI DAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL	9
314	KEPALA SUBBAGIAN PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN	9
315	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	12
316	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	9
317	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN	9
318	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN	9
319	KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN	12
320	KEPALA SUBBAGIAN PENGADAAN DAN ANALISA KEBUTUHAN	9
321	KEPALA SUBBAGIAN INVENTARISASI DAN PENGHAPUSAN	9
322	KEPALA BAGIAN UMUM	12
323	KEPALA SUBBAGIAN PERSURATAN DAN ARSIP	9
324	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA	9
325	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL	9
326	DIREKTUR BINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN	15
327	KEPALA SUBDIREKTORAT STANDARDISASI DAN EVALUASI	12

328	KEPALA SEKSI STANDARDISASI SARANA	9
329	KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI HUNIAN	9
330	KEPALA SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN	12
331	KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN INTELIJEN	9
332	KEPALA SEKSI PENINDAKAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN	9
333	KEPALA SUBDIREKTORAT KODE ETIK PROFESI	12
334	KEPALA SEKSI PENGAWASAN INTERNAL	9
335	KEPALA SEKSI ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM	9
336	KEPALA SEKSI BIMBINGAN TEKNIS PETUGAS KEAMANAN	9
337	KEPALA SUBDIREKTORAT PELAYANAN PENGADUAN	12
338	KEPALA SEKSI PENERIMAAN DAN KLARIFIKASI PENGADUAN	9
339	KEPALA SEKSI INVESTIGASI	9
340	KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN	9
341	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
342	DIREKTUR BINA KESEHATAN DAN PERAWATAN NARAPIDANA DAN TAHANAN	15
343	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGAWASAN MAKANAN	12
344	KEPALA SEKSI GIZI	9
345	KEPALA SEKSI BAHAN MAKANAN	9
346	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA MAKANAN	9
347	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGAWASAN KESEHATAN	12
348	KEPALA SEKSI STANDARDISASI KESEHATAN	9
349	KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN	9
350	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN	9
351	KEPALA SEKSI SANITASI DAN KESEHATAN LINGKUNGAN	9
352	KEPALA SUBDIREKTORAT PENYAKIT MENULAR DAN KETERGANTUNGAN NAPZA	12
353	KEPALA SEKSI PENCEGAHAN	9
354	KEPALA SEKSI REHABILITASI MEDIK	9
355	KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL	9
356	KEPALA SUBDIREKTORAT PERLINDUNGAN KELOMPOK RENTAN DAN RESIKO TINGGI	12
357	KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN KELOMPOK RENTAN	9
358	KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN KELOMPOK RESIKO TINGGI	9
359	KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN KESEHATAN DAN PERAWATAN	9
360	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
361	DIREKTUR BIMBINGAN KEMASYARAKATAN DAN PENGENTASAN ANAK	15
362	KEPALA SUBDIREKTORAT REGISTRASI ANAK DAN KLIEN DEWASA	12
363	KEPALA SEKSI REGISTRASI ANAK	9
364	KEPALA SEKSI REGISTRASI KLIEN DEWASA	9
365	KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN BIMBINGAN KEMASYARAKATAN DAN PENGENTASAN ANAK	9
366	KEPALA SUBDIREKTORAT PENDIDIKAN	12
367	KEPALA SEKSI PENDIDIKAN FORMAL DAN KEPUSTAKAAN	9
368	KEPALA SEKSI PENDIDIKAN KESETARAAN DAN LAYANAN KHUSUS	9
369	KEPALA SEKSI TENAGA INSTRUKTUR	9
370	KEPALA SUBDIREKTORAT PERLINDUNGAN DAN PENGENTASAN ANAK	12

371	KEPALA SEKSI BIMBINGAN DAN PENGENTASAN ANAK	9
372	KEPALA SEKSI PENDAMPINGAN DAN BANTUAN HUKUM	9
373	KEPALA SEKSI KONSULTASI DAN FASILITATOR	9
374	KEPALA SUBDIREKTORAT BIMBINGAN DAN PENGAWASAN KLIEN DEWASA	12
375	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KLIEN DEWASA	9
376	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KETERAMPILAN DAN PENYALURAN KERJA	9
377	KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENINDAKAN	9
378	KEPALA SUBDIREKTORAT PENELITIAN DAN KEMASYARAKATAN	12
379	KEPALA SEKSI PENELITIAN KEMASYARAKATAN ANAK	9
380	KEPALA SEKSI PENELITIAN KEMASYARAKATAN KLIEN DEWASA	9
381	KEPALA SEKSI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN	9
382	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
383	DIREKTUR BINA PENGELOLAAN BASAN DAN BARAN	15
384	KEPALA SUBDIREKTORAT REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI	12
385	KEPALA SEKSI PENERIMAAN DAN PENILAIAN	9
386	KEPALA SEKSI KLASIFIKASI DAN PENEMPATAN	9
387	KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN PENGELOLAAN BASAN DAN BARAN	9
388	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN	12
389	KEPALA SEKSI PENGAMANAN	9
390	KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN	9
391	KEPALA SEKSI BIMBINGAN TEKNIS PETUGAS PENGELOLAAN BASAN DAN BARAN	9
392	KEPALA SUBDIREKTORAT MUTASI DAN PENGHAPUSAN	12
393	KEPALA SEKSI MUTASI	9
394	KEPALA SEKSI PENGHAPUSAN	9
395	KEPALA SEKSI PENGAWASAN BASAN DAN BARAN	9
396	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
397	DIREKTUR INFORMASI DAN KOMUNIKASI	15
398	KEPALA SUBDIREKTORAT DATA DAN INFORMASI	12
399	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI	9
400	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM DATABASE	9
401	KEPALA SEKSI PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN	9
402	KEPALA SUBDIREKTORAT KOMUNIKASI	12
403	KEPALA SEKSI ANALISA DAN STRATEGI KOMUNIKASI	9
404	KEPALA SEKSI PELIPUTAN DAN PENYAJIAN BERITA	9
405	KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	9
406	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA	12
407	KEPALA SEKSI KERJA SAMA DALAM NEGERI	9
408	KEPALA SEKSI KERJA SAMA LUAR NEGERI	9
409	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
410	DIREKTUR BINA NARAPIDANA DAN PELAYANAN TAHANAN	15
411	KEPALA SUBDIREKTORAT REGISTRASI DAN KLASIFIKASI	12
412	KEPALA SEKSI REGISTRASI DAN KLASIFIKASI TAHANAN	9
413	KEPALA SEKSI REGISTRASI DAN KLASIFIKASI NARAPIDANA	9
414	KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBINAAN NARAPIDANA DAN PELAYANAN TAHANAN	9

415	KEPALA SUBDIREKTORAT PELAYANAN TAHANAN DAN BANTUAN HUKUM	12
416	KEPALA SEKSI PELAYANAN TAHANAN	9
417	KEPALA SEKSI BANTUAN HUKUM	9
418	KEPALA SEKSI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN HUKUM	9
419	KEPALA SUBDIREKTORAT INTEGRASI DAN TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN	12
420	KEPALA SEKSI PENDAYAGUNAAN TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN	9
421	KEPALA SEKSI ADMISI ORIENTASI DAN ASIMILASI	9
422	KEPALA SEKSI INTEGRASI UMUM	9
423	KEPALA SEKSI INTEGRASI KHUSUS	9
424	KEPALA SUBDIREKTORAT BIMBINGAN KEMANDIRIAN	12
425	KEPALA SEKSI BIMBINGAN LATIHAN KETERAMPILAN	9
426	KEPALA SEKSI KEGIATAN KERJA INDUSTRI DAN JASA	9
427	KEPALA SEKSI KEGIATAN KERJA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	9
428	KEPALA SEKSI KEGIATAN KERJA PERIKANAN DAN PETERNAKAN	9
429	KEPALA SUBDIREKTORAT BIMBINGAN KEPRIBADIAN	12
430	KEPALA SEKSI KEAGAMAAN	9
431	KEPALA SEKSI OLAHRAGA DAN KESENIAN	9
432	KEPALA SEKSI BIMBINGAN INTELEKTUAL DAN KESADARAN BERNEGARA	9
433	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
434	DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	17
435	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	15
436	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	12
437	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN	9
438	KEPALA SUBBAGIAN DATA DAN INFORMASI	9
439	KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	9
440	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	12
441	KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN	9
442	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI DAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL	9
443	KEPALA SUBBAGIAN PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN	9
444	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	12
445	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	9
446	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN	9
447	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN	9
448	KEPALA BAGIAN UMUM	12
449	KEPALA SUBBAGIAN PERLENGKAPAN	9
450	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA	9
451	KEPALA SUBBAGIAN PERJALANAN DINAS	9
452	KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT	9
453	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	12
454	KEPALA SUBBAGIAN PERSURATAN	9
455	KEPALA SUBBAGIAN SISTEM INFORMASI	9
456	KEPALA SUBBAGIAN ARSIP DAN DOKUMENTASI	9
457	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL	9
458	DIREKTUR PERDATA	15
459	KEPALA SUBDIREKTORAT HUKUM PERDATA UMUM	12



460	KEPALA SEKSI PENDAPAT HUKUM DAN ADVOKASI KEPERDATAAN	9
461	KEPALA SEKSI LEGALISASI	9
462	KEPALA SEKSI ADVOKAT ASING DAN PENTERJEMAH RESMI TERSUMPAH	9
463	KEPALA SEKSI ARSIP DAN DOKUMENTASI PERDATA UMUM	9
464	KEPALA SUBDIREKTORAT BADAN HUKUM	12
465	KEPALA SEKSI PERSEROAN TERTUTUP	9
466	KEPALA SEKSI PERSEROAN TERBUKA, LEMBAGA KEUANGAN DAN PENANAMAN MODAL	9
467	KEPALA SEKSI BADAN HUKUM SOSIAL	9
468	KEPALA SEKSI DOKUMENTASI DAN PENGUMUMAN BADAN HUKUM	9
469	KEPALA SUBDIREKTORAT PENDAFTARAN FIDUSIA	12
470	KEPALA SEKSI PENERIMAAN DAN PEMROSESAN	9
471	KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN FIDUSIA	9
472	KEPALA SEKSI ARSIP DAN DOKUMENTASI FIDUSIA	9
473	KEPALA SUBDIREKTORAT HARTA PENINGGALAN	12
474	KEPALA SEKSI BALAI HARTA PENINGGALAN	9
475	KEPALA SEKSI DAFTAR WASIAT	9
476	KEPALA SEKSI ARSIP DAN DOKUMENTASI HARTA PENINGGALAN	9
477	KEPALA SUBDIREKTORAT NOTARIAT	12
478	KEPALA SEKSI PENGANGKATAN DAN PEMINDAHAN NOTARIS	9
479	KEPALA SEKSI PERPANJANGAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN NOTARIS	9
480	KEPALA SEKSI ARSIP DAN DOKUMENTASI NOTARIAT	9
481	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
482	DIREKTUR PIDANA	15
483	KEPALA SUBDIREKTORAT PELAYANAN HUKUM PIDANA DAN GRASI	12
484	KEPALA SEKSI PELAYANAN HUKUM PIDANA UMUM	9
485	KEPALA SEKSI PELAYANAN HUKUM PIDANA KHUSUS DAN GRASI	9
486	KEPALA SUBDIREKTORAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI HUKUM PIDANA	12
487	KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI HUKUM PIDANA UMUM	9
488	KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI HUKUM PIDANA KHUSUS	9
489	KEPALA SUBDIREKTORAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL	12
490	KEPALA SEKSI PENGANGKATAN, PEMUTASIAN DAN PEMBERHENTIAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL	9
491	KEPALA SEKSI BIMBINGAN DAN EVALUASI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL	9
492	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
493	DIREKTUR TATA NEGARA	15
494	KEPALA SUBDIREKTORAT HUKUM TATA NEGARA	12
495	KEPALA SEKSI ANALISA DAN PERTIMBANGAN HUKUM	9
496	KEPALA SEKSI DOKUMENTASI DAN EVALUASI DATA PARTAI POLITIK	9
497	KEPALA SEKSI PENDAFTARAN PARTAI POLITIK	9
498	KEPALA SUBDIREKTORAT PEWARGANEGARAAN	12

499	KEPALA SEKSI ANALISA DAN PERTIMBANGAN PEWARGANEGARAAN	9
500	KEPALA SEKSI PENYELESAIAN PEWARGANEGARAAN	9
501	KEPALA SUBDIREKTORAT KEWARGANEGARAAN	12
502	KEPALA SEKSI PEROLEHAN KEWARGANEGARAAN	9
503	KEPALA SEKSI KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN	9
504	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DATA KEWARGANEGARAAN	9
505	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
506	DIREKTUR HUKUM INTERNASIONAL DAN OTORITAS PUSAT	15
507	KEPALA SUBDIREKTORAT OTORITAS PUSAT DAN HUKUM HUMANITER	12
508	KEPALA SEKSI HUKUM HUMANITER	9
509	KEPALA SEKSI EKSTRADISI DAN PEMINDAHAN NARAPIDANA	9
510	KEPALA SEKSI BANTUAN HUKUM DAN TIMBAL BALIK	9
511	KEPALA SUBDIREKTORAT HUKUM EKONOMI, PERDATA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL	12
512	KEPALA SEKSI HUKUM EKONOMI DAN LEMBAGA INTERNASIONAL	9
513	KEPALA SEKSI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL	9
514	KEPALA SUBDIREKTORAT HUKUM LAUT, UDARA DAN LINGKUNGAN	12
515	KEPALA SEKSI HUKUM LAUT	9
516	KEPALA SEKSI HUKUM UDARA DAN ANGKASA	9
517	KEPALA SEKSI HUKUM LINGKUNGAN	9
518	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
519	DIREKTUR DAKTILOSKOPI	15
520	KEPALA SUBDIREKTORAT PERUMUSAN DAN IDENTIFIKASI	12
521	KEPALA SEKSI PERUMUSAN	9
522	KEPALA SEKSI IDENTIFIKASI	9
523	KEPALA SUBDIREKTORAT DATA DAN INFORMASI	12
524	KEPALA SEKSI PENGUMPULAN DATA	9
525	KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI	9
526	KEPALA SUBDIREKTORAT DOKUMENTASI DAN ARSIP	12
527	KEPALA SEKSI DOKUMENTASI	9
528	KEPALA SEKSI ARSIP	9
529	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
530	DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	17
531	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	15
532	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	12
533	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN	9
534	KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	9
535	KEPALA SUBBAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ORGANISASI	9
536	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	12
537	KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN	9
538	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI, PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN	9
539	KEPALA SUBBAGIAN PENGEMBANGAN PEGAWAI	9
540	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	12
541	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	9
542	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN	9
543	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN	9
544	KEPALA BAGIAN UMUM	12

545	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA	9
546	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA	9
547	KEPALA SUBBAGIAN PERJALANAN DINAS DAN KENDARAAN OPERASIONAL	9
548	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN	9
549	KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	12
550	KEPALA SUBBAGIAN PERSURATAN	9
551	KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT	9
552	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL	9
553	DIREKTUR HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG	15
554	KEPALA SUBDIREKTORAT PERMOHONAN DAN PUBLIKASI	12
555	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI PERMOHONAN	9
556	KEPALA SEKSI PUBLIKASI	9
557	KEPALA SUBDIREKTORAT KLASIFIKASI DAN PEMERIKSAAN	12
558	KEPALA SEKSI PELAYANAN TEKNIS	9
559	KEPALA SEKSI KLASIFIKASI DAN PENELUSURAN	9
560	KEPALA SUBDIREKTORAT SERTIFIKASI, MUTASI DAN LISENSI	12
561	KEPALA SEKSI SERTIFIKASI	9
562	KEPALA SEKSI MUTASI DAN LISENSI	9
563	KEPALA SUBDIREKTORAT PELAYANAN HUKUM	12
564	KEPALA SEKSI PERTIMBANGAN HUKUM DAN LITIGASI	9
565	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KOMISI BANDING DAN DEWAN HAK CIPTA	9
566	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
567	DIREKTUR PATEN	15
568	KEPALA SUBDIREKTORAT PERMOHONAN DAN PUBLIKASI	12
569	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI PERMOHONAN	9
570	KEPALA SEKSI PUBLIKASI	9
571	KEPALA SUBDIREKTORAT KLASIFIKASI DAN PENELUSURAN	12
572	KEPALA SEKSI KLASIFIKASI	9
573	KEPALA SEKSI PENELUSURAN	9
574	KEPALA SUBDIREKTORAT PEMERIKSAAN	12
575	KEPALA SEKSI PELAYANAN TEKNIS	9
576	KEPALA SUBDIREKTORAT SERTIFIKASI, PEMELIHARAAN, MUTASI DAN LISENSI	12
577	KEPALA SEKSI SERTIFIKASI	9
578	KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN, MUTASI DAN LISENSI	9
579	KEPALA SUBDIREKTORAT PELAYANAN HUKUM	12
580	KEPALA SEKSI PERTIMBANGAN HUKUM DAN LITIGASI	9
581	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KOMISI BANDING	9
582	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
583	DIREKTUR MEREK	15
584	KEPALA SUBDIREKTORAT PERMOHONAN DAN PUBLIKASI	12
585	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI DAN PERMOHONAN	9
586	KEPALA SEKSI PUBLIKASI	9
587	KEPALA SEKSI KLASIFIKASI	9
588	KEPALA SUBDIREKTORAT PEMERIKSAAN	12
589	KEPALA SEKSI PELAYANAN TEKNIS	9
590	KEPALA SUBDIREKTORAT INDIKASI GEOGRAFIS	12
591	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI PEMERIKSAAN	9
592	KEPALA SEKSI EVALUASI TEKNIS	9

593	KEPALA SUBDIREKTORAT SERTIFIKASI , PERPANJANGAN, MUTASI DAN LISENSI	12
594	KEPALA SEKSI SERTIFIKASI	9
595	KEPALA SEKSI PERPANJANGAN, MUTASI DAN LISENSI	9
596	KEPALA SUBDIREKTORAT PELAYANAN HUKUM	12
597	KEPALA SEKSI PERTIMBANGAN HUKUM DAN LITIGASI	9
598	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KOMISI BANDING	9
599	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
600	DIREKTUR KERJA SAMA DAN PROMOSI	15
601	KEPALA SUBDIREKTORAT PROMOSI	12
602	KEPALA SEKSI PENYIAPAN MATERI PROMOSI	9
603	KEPALA SEKSI PROMOSI DAN SOSIALISASI	9
604	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA LUAR NEGERI	12
605	KEPALA SEKSI KERJA SAMA REGIONAL	9
606	KEPALA SEKSI KERJA SAMA BILATERAL	9
607	KEPALA SEKSI KERJA SAMA MULTILATERAL	9
608	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA DALAM NEGERI	12
609	KEPALA SEKSI KERJA SAMA INSTITUSI PEMERINTAH	9
610	KEPALA SEKSI KERJA SAMA INSTITUSI NON PEMERINTAH	9
611	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
612	DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI	15
613	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM	12
614	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DATABASE	9
615	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI	9
616	KEPALA SUBDIREKTORAT PENDUKUNG SISTEM	12
617	KEPALA SEKSI LAYANAN KELUHAN DAN PEMELIHARAAN	9
618	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN SISTEM JARINGAN	9
619	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN PROSES	12
620	KEPALA SEKSI PROSES KERJA TEKNOLOGI INFORMASI	9
621	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN SITUS INTERNET	9
622	KEPALA SUBDIREKTORAT DOKUMENTASI DAN PERPUSTAKAAN	12
623	KEPALA SEKSI DOKUMENTASI HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG	9
624	KEPALA SEKSI DOKUMENTASI PATEN	9
625	KEPALA SEKSI DOKUMENTASI MEREK	9
626	KEPALA SEKSI PERPUSTAKAAN	9
627	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
628	DIREKTUR PENYIDIKAN	15
629	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGADUAN	12
630	KEPALA SEKSI PENERIMAAN PENGADUAN	9
631	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI PENYIDIKAN	9
632	KEPALA SUBDIREKTORAT PENINDAKAN DAN PEMANTAUAN	12
633	KEPALA SEKSI PENINDAKAN	9
634	KEPALA SEKSI PEMANTAUAN	9
635	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
636	DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA	17
637	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA	15
638	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	12
639	KEPALA SUBBAGIAN DATA DAN INFORMASI	9
640	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN	9

641	KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	9
642	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	12
643	KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN	9
644	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI	9
645	KEPALA SUBBAGIAN PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN	9
646	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	12
647	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	9
648	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN	9
649	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN	9
650	KEPALA BAGIAN UMUM	12
651	KEPALA SUBBAGIAN PERLENGKAPAN	9
652	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA	9
653	KEPALA SUBBAGIAN PERJALANAN DINAS	9
654	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	12
655	KEPALA SUBBAGIAN PERSURATAN DAN KEARSIPAN	9
656	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN	9
657	KEPALA SUBBAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	9
658	DIREKTUR PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT	15
659	KEPALA SUBDIREKTORAT PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT WILAYAH I	12
660	KEPALA SEKSI HAK SIPIL DAN POLITIK WILAYAH I	9
661	KEPALA SEKSI HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA WILAYAH I	9
662	KEPALA SUBDIREKTORAT PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT WILAYAH II	12
663	KEPALA SEKSI HAK SIPIL DAN POLITIK WILAYAH II	9
664	KEPALA SEKSI HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA WILAYAH II	9
665	KEPALA SUBDIREKTORAT PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT WILAYAH III	12
666	KEPALA SEKSI HAK SIPIL DAN POLITIK WILAYAH III	9
667	KEPALA SEKSI HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA WILAYAH III	9
668	KEPALA SUBDIREKTORAT PELAYANAN KOMUNIKASI KHUSUS	12
669	KEPALA SEKSI HAK SIPIL DAN POLITIK	9
670	KEPALA SEKSI HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	9
671	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
672	DIREKTUR KERJA SAMA HAK ASASI MANUSIA	15
673	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA LUAR NEGERI	12
674	KEPALA SEKSI KERJA SAMA ANTAR NEGARA	9
675	KEPALA SEKSI KERJA SAMA BADAN-BADAN KHUSUS PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA	9
676	KEPALA SEKSI KERJA SAMA ORGANISASI INTERNASIONAL NON PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA	9
677	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA DALAM NEGERI	12
678	KEPALA SEKSI KERJA SAMA INSTITUSI PEMERINTAH	9
679	KEPALA SEKSI KERJA SAMA INSTITUSI NON PEMERINTAH	9
680	KEPALA SUBDIREKTORAT LEGISLASI DAN HARMONISASI HAK ASASI MANUSIA	12
681	KEPALA SEKSI TELAAHAN NASKAH AKADEMIK	9
682	KEPALA SEKSI LEGISLASI	9
683	KEPALA SEKSI HARMONISASI	9
684	KEPALA SUBDIREKTORAT INSTRUMEN HAK ASASI MANUSIA	12
685	KEPALA SEKSI KOVENAN HAK SIPIL DAN POLITIK	9

686	KEPALA SEKSI KOVENAN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	9
687	KEPALA SEKSI KONVENSI	9
688	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
689	DIREKTUR DISEMINASI HAK ASASI MANUSIA	15
690	KEPALA SUBDIREKTORAT PROGRAM DISEMINASI	12
691	KEPALA SEKSI METODOLOGI DISEMINASI HAK ASASI MANUSIA	9
692	KEPALA SEKSI BAHAN DISEMINASI HAK ASASI MANUSIA	9
693	KEPALA SUBDIREKTORAT PEMBUDAYAAN KESADARAN HAK ASASI MANUSIA	12
694	KEPALA SEKSI APARATUR NEGARA	9
695	KEPALA SEKSI MASYARAKAT	9
696	KEPALA SUBDIREKTORAT PENYULUHAN HAK ASASI MANUSIA	12
697	KEPALA SEKSI PENYIAPAN PENYULUH HAK ASASI MANUSIA	9
698	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PENYULUH HAK ASASI MANUSIA	9
699	KEPALA SUBDIREKTORAT EVALUASI DAN PENGEMBANGAN DISEMINASI HAK ASASI MANUSIA	12
700	KEPALA SEKSI EVALUASI DISEMINASI HAK ASASI MANUSIA	9
701	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DISEMINASI HAK ASASI MANUSIA	9
702	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
703	DIREKTUR PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA	15
704	KEPALA SUBDIREKTORAT PROGRAM DAN BIMBINGAN TEKNIS HAK ASASI MANUSIA	12
705	KEPALA SEKSI PROGRAM BIMBINGAN TEKNIS HAK ASASI MANUSIA	9
706	KEPALA SEKSI BAHAN BIMBINGAN TEKNIS HAK ASASI MANUSIA	9
707	KEPALA SEKSI FASILITATOR BIMBINGAN TEKNIS HAK ASASI MANUSIA	9
708	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN JARINGAN BIMBINGAN TEKNIS HAK ASASI MANUSIA	9
709	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH I	12
710	KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS HAK ASASI MANUSIA WILAYAH I	9
711	KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PENGEMBANGAN BIMBINGAN TEKNIS HAK ASASI MANUSIA WILAYAH I	9
712	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH II	12
713	KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS HAK ASASI MANUSIA WILAYAH II	9
714	KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PENGEMBANGAN BIMBINGAN TEKNIS HAK ASASI MANUSIA WILAYAH II	9
715	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH III	12
716	KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS HAK ASASI MANUSIA WILAYAH III	9
717	KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PENGEMBANGAN BIMBINGAN TEKNIS HAK ASASI MANUSIA WILAYAH III	9
718	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
719	DIREKTUR INFORMASI HAK ASASI MANUSIA	15

720	KEPALA SUBDIREKTORAT DATA DAN INFORMASI HAK ASASI MANUSIA	12
721	KEPALA SEKSI DATA DAN INFORMASI WILAYAH I	9
722	KEPALA SEKSI DATA DAN INFORMASI WILAYAH II	9
723	KEPALA SEKSI DATA DAN INFORMASI WILAYAH III	9
724	KEPALA SUBDIREKTORAT SISTEM DAN JARINGAN HAK ASASI MANUSIA	12
725	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM DAN JARINGAN HAK ASASI MANUSIA	9
726	KEPALA SEKSI PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN SISTEM DAN JARINGAN HAK ASASI MANUSIA	9
727	KEPALA SEKSI JEJARING INFORMASI HAK ASASI MANUSIA	9
728	KEPALA SUBDIREKTORAT PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA	12
729	KEPALA SEKSI PUBLIKASI HAK ASASI MANUSIA	9
730	KEPALA SEKSI DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA	9
731	KEPALA SEKSI PERPUSTAKAAN HAK ASASI MANUSIA	9
732	KEPALA SUBDIREKTORAT EVALUASI DAN PELAPORAN HAK ASASI MANUSIA	12
733	KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN WILAYAH I	9
734	KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN WILAYAH II	9
735	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
736	DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	17
737	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15
738	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	12
739	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN	9
740	KEPALA SUBBAGIAN DATA DAN PELAPORAN	9
741	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	12
742	KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL	9
743	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN	9
744	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	12
745	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	9
746	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI	9
747	KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN	12
748	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA	9
749	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN	9
750	KEPALA BAGIAN UMUM	12
751	KEPALA SUBBAGIAN PERSURATAN	9
752	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA	9
753	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	9
754	DIREKTUR PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15
755	KEPALA SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DAN PERANCANGAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	12
756	KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG	9
757	KEPALA SEKSI PENYIAPAN DAN PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	9

758	KEPALA SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DAN PERANCANGAN RANCANAGAN PERATURAN PEMERINTAH, PERATURAN PRESIDEN DAN PERATURAN MENTERI	12
759	KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PERANCANGAN I	9
760	KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PERANCANGAN II	9
761	KEPALA SUBDIREKTORAT PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	12
762	KEPALA SEKSI PENYIAPAN BAHAN DAN DATA	9
763	KEPALA SEKSI PENYELENGARAAN PEMBAHASAN	9
764	KEPALA SUBDIREKTORAT PEMBINAAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	12
765	KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9
766	KEPALA SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9
767	KEPALA SUBDIREKTORAT DOKUMENTASI DAN PERPUSTAKAAN	12
768	KEPALA SEKSI DOKUMENTASI	9
769	KEPALA SEKSI PERPUSTAKAAN HUKUM	9
770	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
771	DIREKTUR HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15
772	KEPALA SUBDIREKTORAT HARMONISASI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	12
773	KEPALA SEKSI POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN I	9
774	KEPALA SEKSI POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN II	9
775	KEPALA SUBDIREKTORAT HARMONISASI BIDANG KEUANGAN DAN PERBANKAN	12
776	KEPALA SEKSI KEUANGAN DAN PERBANKAN I	9
777	KEPALA SEKSI KEUANGAN DAN PERBANKAN II	9
778	KEPALA SUBDIREKTORAT HARMONISASI BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN RISET DAN TEKNOLOGI	12
779	KEPALA SEKSI INDUSTRI, PERDAGANGAN, RISET DAN TEKNOLOGI I	9
780	KEPALA SEKSI INDUSTRI, PERDAGANGAN, RISET DAN TEKNOLOGI II	9
781	KEPALA SUBDIREKTORAT HARMONISASI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	12
782	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT I	9
783	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT II	9
784	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
785	DIREKTUR PENGUNDANGAN, PUBLIKASI, DAN KERJA SAMA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15
786	KEPALA SUBDIREKTORAT PUBLIKASI	12
787	KEPALA SEKSI PENERBITAN	9
788	KEPALA SEKSI DISTRIBUSI DAN PENYEBARLUASAN	9
789	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA	12
790	KEPALA SEKSI KERJA SAMA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI	9
791	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	12
792	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI PENGUNDANGAN	9
793	KEPALA SEKSI DOKUMENTASI	9
794	KEPALA SUBDIREKTORAT SISTEM INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	12



795	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DATABASE	9
796	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA SISTEM INFORMASI	9
797	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
798	DIREKTUR LITIGASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15
799	KEPALA SUBDIREKTORAT PENYIAPAN DAN PENDAMPINGAN PERSIDANGAN I	12
800	KEPALA SEKSI PENYIAPAN KETERANGAN PEMERINTAH	9
801	KEPALA SEKSI KOORDINASI DAN MONITORING PERSIDANGAN	9
802	KEPALA SUBDIREKTORAT FASILITASI BAHAN DAN ANALISA	12
803	KEPALA SEKSI PENYIAPAN BAHAN DAN DATA	9
804	KEPALA SEKSI ANALISA, PELAPORAN DAN DOKUMENTASI	9
805	KEPALA SUBDIREKTORAT PENYIAPAN DAN PENDAMPINGAN PERSIDANGAN II	12
806	KEPALA SEKSI PENYIAPAN KETERANGAN PEMERINTAH DAN MONITORING	9
807	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
808	DIREKTUR FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH	15
809	KEPALA SUBDIREKTORAT PEMETAAN DAN PUBLIKASI PERATURAN DAERAH	12
810	KEPALA SEKSI PEMETAAN DAN INVENTARISASI PERATURAN DAERAH	9
811	KEPALA SEKSI PUBLIKASI PERATURAN DAERAH	9
812	KEPALA SUBDIREKTORAT FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH WILAYAH I	12
813	KEPALA SEKSI BIMBINGAN DAN KONSULTASI PERATURAN DAERAH WILAYAH I.1	9
814	KEPALA SEKSI BIMBINGAN DAN KONSULTASI PERATURAN DAERAH WILAYAH I.2	9
815	KEPALA SUBDIREKTORAT FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH WILAYAH II	12
816	KEPALA SEKSI BIMBINGAN DAN KONSULTASI PERATURAN DAERAH WILAYAH II	9
817	KEPALA SUBDIREKTORAT FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH WILAYAH III	12
818	KEPALA SEKSI BIMBINGAN DAN KONSULTASI PERATURAN DAERAH WILAYAH III	9
819	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
820	KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	17
821	SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	15
822	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN KERJA SAMA	12
823	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN	9
824	KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	9
825	KEPALA SUBBAGIAN KERJA SAMA	9
826	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	12
827	KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL	9
828	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	9
829	KEPALA SUBBAGIAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	9
830	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	12
831	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	9

832	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN	9
833	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN	9
834	KEPALA BAGIAN UMUM	12
835	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
836	KEPALA SUBBAGIAN PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA	9
837	KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	9
838	KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN	15
839	KEPALA BIDANG PROGRAM	12
840	KEPALA SUBBIDANG PENYUSUNAN PROGRAM	9
841	KEPALA SUBBIDANG STANDARDISASI DAN METODA	9
842	KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN	12
843	KEPALA SUBBIDANG PENGAJARAN	9
844	KEPALA SUBBIDANG ADMINISTRASI PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	9
845	KEPALA BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN	12
846	KEPALA SUBBIDANG EVALUASI	9
847	KEPALA SUBBIDANG PELAPORAN	9
848	KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN TEKNIS	15
849	KEPALA BIDANG PROGRAM	12
850	KEPALA SUBBIDANG PENYUSUNAN PROGRAM	9
851	KEPALA SUBBIDANG STANDARDISASI DAN METODA	9
852	KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN	12
853	KEPALA SUBBIDANG PENGAJARAN	9
854	KEPALA SUBBIDANG ADMINISTRASI PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	9
855	KEPALA BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN	12
856	KEPALA SUBBIDANG EVALUASI	9
857	KEPALA SUBBIDANG PELAPORAN	9
858	KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN FUNGSIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA	15
859	KEPALA BIDANG PROGRAM	12
860	KEPALA SUBBIDANG PENYUSUNAN PROGRAM	9
861	KEPALA SUBBIDANG STANDARDISASI DAN METODA	9
862	KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN	12
863	KEPALA SUBBIDANG PENGAJARAN	9
864	KEPALA SUBBIDANG ADMINISTRASI PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	9
865	KEPALA BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN	12
866	KEPALA SUBBIDANG EVALUASI	9
867	KEPALA SUBBIDANG PELAPORAN	9
868	DIREKTUR AKADEMI ILMU PEMASYARAKATAN	13
869	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI UMUM	9
870	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN	8
871	KEPALA URUSAN KEUANGAN	8
872	KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA	8
873	KEPALA SUBBAGIAN AKADEMI DAN KETARUNAAN	9
874	KEPALA URUSAN ADMINISTRASI AKADEMIK	8
875	KEPALA URUSAN ADMINISTRASI KETARUNAAN	8
876	DIREKTUR AKADEMI IMIGRASI	13
877	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI UMUM	9
878	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN	8
879	KEPALA URUSAN KEUANGAN	8

880	KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA	8
881	KEPALA SUBBAGIAN ADMMINISTRASI AKADEMI DAN KETARUNAAN	9
882	KEPALA URUSAN ADMINISTRASI AKADEMIK	8
883	KEPALA URUSAN ADMINISTRASI KETARUNAAN	8
884	KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	17
885	SEKRETARIS BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	15
886	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	12
887	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN	9
888	KEPALA SUBBAGIAN DATA DAN INFORMASI	9
889	KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	9
890	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	12
891	KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN	9
892	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI DAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL	9
893	KEPALA SUBBAGIAN PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN	9
894	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	12
895	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	9
896	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN	9
897	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN	9
898	KEPALA BAGIAN UMUM	12
899	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEARSIPAN	9
900	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA	9
901	KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	9
902	KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA	12
903	KEPALA SUBBAGIAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA	9
904	KEPALA SUBBAGIAN PENYIMPANAN DAN PENYALURAN BARANG MILIK NEGARA	9
905	KEPALA SUBBAGIAN PENILAIAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA	9
906	KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM HUKUM NASIONAL	15
907	KEPALA BIDANG PENELITIAN KELEMBAGAAN DAN PENEGAKAN HUKUM	12
908	KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN KELEMBAGAAN HUKUM	9
909	KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN PENEGAKAN HUKUM	9
910	KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN SUBSTANSI HUKUM	12
911	KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN KEBUTUHAN HUKUM	9
912	KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN HUKUM POSITIF	9
913	KEPALA BIDANG PENELITIAN BUDAYA HUKUM DAN MASYARAKAT	12
914	KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN HUBUNGAN HUKUM DAN MASYARAKAT	9
915	KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN HUKUM TIDAK TERTULIS	9
916	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN HUKUM DAN FASILITASI PENELITIAN	12
917	KEPALA SUBBIDANG PERTEMUAN ILMIAH DAN KERJA SAMA PENELITIAN	9
918	KEPALA SUBBIDANG FASILITASI JABATAN FUNGSIONAL PENELITI HUKUM DAN PENELITIAN	9
919	KEPALA PUSAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL	15

920	KEPALA BIDANG RENCANA DAN FASILITASI PEMBANGUNAN HUKUM	12
921	KEPALA SUBBIDANG PENYIAPAN RENCANA PEMBANGUNAN HUKUM	9
922	KEPALA SUBBIDANG PERENCANAAN KERJA SAMA HUKUM	9
923	KEPALA SUBBIDANG FASILITASI PERENCANAAN HUKUM	9
924	KEPALA BIDANG PERENCANAAN LEGISLASI	12
925	KEPALA SUBBIDANG PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL	9
926	KEPALA SUBBIDANG FASILITASI PROGRAM LEGISLASI DAERAH	9
927	KEPALA BIDANG PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	12
928	KEPALA SUBBIDANG POLITIK, HUKUM, KEAMANAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	9
929	KEPALA SUBBIDANG PEREKONOMIAN	9
930	KEPALA PUSAT DOKUMENTASI DAN JARINGAN INFORMASI HUKUM NASIONAL	15
931	KEPALA BIDANG OTOMASI DOKUMENTASI HUKUM	12
932	KEPALA SUBBIDANG SISTEM DAN JARINGAN ELEKTRONIK	9
933	KEPALA SUBBIDANG DATABASE DAN DOKUMENTASI HUKUM	9
934	KEPALA BIDANG PERPUSTAKAAN HUKUM	12
935	KEPALA SUBBIDANG PENGUMPULAN KOLEKSI	9
936	KEPALA SUBBIDANG PEMELIHARAAN KOLEKSI	9
937	KEPALA SUBBIDANG PELAYANAN PEMUSTAKA	9
938	KEPALA BIDANG JARINGAN INFORMASI HUKUM	12
939	KEPALA SUBBIDANG PEMBERDAYAAN JARINGAN INFORMASI	9
940	KEPALA SUBBIDANG FASILITASI DAN PENGUATAN JARINGAN	9
941	KEPALA SUBBIDANG PENERBITAN DAN PUBLIKASI HUKUM	9
942	KEPALA PUSAT PENYULUHAN HUKUM	15
943	KEPALA BIDANG DESA SADAR HUKUM	12
944	KEPALA SUBBIDANG PEMETAAN DESA SADAR HUKUM	9
945	KEPALA SUBBIDANG EVALUASI DESA SADAR HUKUM	9
946	KEPALA SUBBIDANG FASILITASI DESA SADAR HUKUM	9
947	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PENYULUHAN HUKUM	12
948	KEPALA SUBBIDANG METODE PENYULUHAN HUKUM	9
949	KEPALA SUBBIDANG PENYULUH HUKUM	9
950	KEPALA SUBBIDANG SARANA PENYULUHAN HUKUM	9
951	KEPALA BIDANG PEMBUDAYAAN HUKUM	12
952	KEPALA SUBBIDANG PEMBERDAYAAN UNIT PELAYANAN HUKUM	9
953	KEPALA SUBBIDANG PENYULUHAN HUKUM LANGSUNG	9
954	KEPALA SUBBIDANG PENYULUHAN HUKUM TIDAK LANGSUNG	9
955	KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA	17
956	SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA	15
957	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	12
958	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN	9
959	KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	9
960	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	12

961	KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN	9
962	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI DAN PENSIUN	9
963	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	12
964	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	9
965	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI	9
966	KEPALA BAGIAN UMUM	12
967	KEPALA SUBBAGIAN PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA	9
968	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN PERJALANAN DINAS	9
969	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN	9
970	KEPALA BAGIAN HUMAS DAN INFORMASI	12
971	KEPALA SUBBAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	9
972	KEPALA SUBBAGIAN DATA, INFORMASI DAN DOKUMENTASI	9
973	KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK	15
974	KEPALA BIDANG PENELITIAN HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK	12
975	KEPALA SUBBIDANG PERENCANAAN PENELITIAN HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK	9
976	KEPALA SUBBIDANG PELAKSANAAN PENELITIAN HAK-HAK POLITIK DAN POLITIK	9
977	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK	12
978	KEPALA SUBBIDANG PUBLIKASI HASIL PENELITIAN	9
979	KEPALA SUBBIDANG SOSIALISASI HASIL PENELITIAN	9
980	KEPALA BIDANG EVALUASI HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK	12
981	KEPALA SUBBIDANG EVALUASI HASIL PENELITIAN	9
982	KEPALA SUBBIDANG EVALUASI PENERAPAN HASIL PENELITIAN	9
983	KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	15
984	KEPALA BIDANG PENELITIAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	12
985	KEPALA SUBBIDANG PERENCANAAN PENELITIAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	9
986	KEPALA SUBBIDANG PELAKSANAAN PENELITIAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	9
987	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	12
988	KEPALA SUBBIDANG PUBLIKASI HASIL PENELITIAN	9
989	KEPALA SUBBIDANG SOSIALISASI HASIL PENELITIAN	9
990	KEPALA BIDANG EVALUASI HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	12
991	KEPALA SUBBIDANG EVALUASI HASIL PENELITIAN	9
992	KEPALA SUBBIDANG EVALUASI PENERAPAN HASIL PENELITIAN	9
993	KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TRANSFORMASI KONFLIK	15
994	KEPALA BIDANG PENELITIAN TRANSFORMASI KONFLIK	12
995	KEPALA SUBBIDANG PERENCANAAN PENELITIAN TRANSFORMASI KONFLIK	9
996	KEPALA SUBBIDANG PELAKSANAAN PENELITIAN TRANSFORMASI KONFLIK	9
997	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN TRANSFORMASI KONFLIK	12
998	KEPALA SUBBIDANG PUBLIKASI HASIL PENELITIAN	9
999	KEPALA SUBBIDANG SOSIALISASI HASIL PENELITIAN	9
1000	KEPALA BIDANG EVALUASI TRANSFORMASI KONFLIK	12

1001	KEPALA SUBBIDANG EVALUASI HASIL PENELITIAN	9
1002	KEPALA SUBBIDANG EVALUASI PENERAPAN HASIL PENELITIAN	9
1003	KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK-HAK KELOMPOK KHUSUS	15
1004	KEPALA BIDANG PENELITIAN HAK-HAK KELOMPOK KHUSUS	12
1005	KEPALA SUBBIDANG PERENCANAAN PENELITIAN HAK-HAK KELOMPOK KHUSUS	9
1006	KEPALA SUBBIDANG PELAKSANAAN PENELITIAN HAK-HAK KELOMPOK KHUSUS	9
1007	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN HAK-HAK KELOMPOK KHUSUS	12
1008	KEPALA SUBBIDANG PUBLIKASI HASIL PENELITIAN	9
1009	KEPALA SUBBIDANG SOSIALISASI HASIL PENELITIAN	9
1010	KEPALA BIDANG EVALUASI HAK-HAK KELOMPOK KHUSUS	12
1011	KEPALA SUBBIDANG EVALUASI HASIL PENELITIAN	9
1012	KEPALA SUBBIDANG EVALUASI PENERAPAN HASIL PENELITIAN	9
1013	KEPALA KANTOR WILAYAH	15
1014	KEPALA DIVISI ADMINISTRASI	14
1015	KEPALA BAGIAN UMUM	12
1016	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TATA USAHA	9
1017	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	9
1018	KEPALA BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN LAPORAN	12
1019	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM	9
1020	KEPALA SUBBAGIAN HUMAS DAN LAPORAN	9
1021	KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN	14
1022	KEPALA BIDANG KEAMANAN DAN PEMBINAAN	12
1023	KEPALA SUBBIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN	9
1024	KEPALA SUBBIDANG BIMBINGAN KEMASYARAKATAN, LATIHAN KERJA DAN PRODUKSI	9
1025	KEPALA BIDANG REGISTRASI, PERAWATAN DAN BINA KHUSUS NARKOTIKA	12
1026	KEPALA SUBBIDANG REGISTRASI DAN STATISTIK	9
1027	KEPALA SUBBIDANG PERAWATAN DAN BINA KHUSUS NARKOTIKA	9
1028	KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN	14
1029	KEPALA BIDANG LALU LINTAS, IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN	12
1030	KEPALA SUBBIDANG LALU LINTAS KEIMIGRASIAN	9
1031	KEPALA SUBBIDANG IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN	9
1032	KEPALA BIDANG INTELJEN, PENINDAKAN DAN SISTEM INFORMASI KEIMIGRASIAN	12
1033	KEPALA SUBBIDANG INTELJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	9
1034	KEPALA SUBBIDANG SISTEM INFORMASI KEIMIGRASIAN	9
1035	KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	14
1036	KEPALA BIDANG PELAYANAN HUKUM	12
1037	KEPALA SUBBIDANG PELAYANAN HUKUM UMUM	9
1038	KEPALA SUBBIDANG PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM	9
1039	KEPALA BIDANG HUKUM	12
1040	KEPALA SUBBIDANG PENGEMBANGAN HUKUM	9

1041	KEPALA SUBBIDANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM	9
1042	KEPALA BIDANG HAK ASASI MANUSIA	12
1043	KEPALA SUBBIDANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA	9
1044	KEPALA SUB BIDANG DISEMINASI HAK ASASI MANUSIA	9
1045	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I	14
1046	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN	11
1047	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	11
1048	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN	9
1049	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN	9
1050	KEPALA SUBBAGIAN UMUM	9
1051	KEPALA BIDANG PEMBINAAN NAPI	11
1052	KEPALA SEKSI REGISTRASI	9
1053	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN	9
1054	KEPALA SEKSI PERAWATAN NAPI	9
1055	KEPALA BIDANG KEGIATAN KERJA	11
1056	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KERJA	9
1057	KEPALA SEKSI SARANA KERJA	9
1058	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN HASIL KERJA	9
1059	KEPALA BIDANG ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB	11
1060	KEPALA SEKSI KEAMANAN	9
1061	KEPALA SEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB	9
1062	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA	12
1063	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN	9
1064	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
1065	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	8
1066	KEPALA URUSAN UMUM	8
1067	KEPALA SEKSI BIMBINGAN NAPI/ANAK DIDIK	9
1068	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI	8
1069	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN DAN PERAWATAN	8
1070	KEPALA SEKSI KEGIATAN KERJA	9
1071	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KERJA DAN PENGELOLAAN HASIL KERJA	8
1072	KEPALA SUBSEKSI SARANA KERJA	8
1073	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB	9
1074	KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN	8
1075	KEPALA SUBSEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB	8
1076	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA NARKOTIKA	12
1077	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN	9
1078	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
1079	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	8
1080	KEPALA URUSAN UMUM	8
1081	KEPALA SEKSI BIMBINGAN NAPI/ANAK DIDIK	9
1082	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI	8
1083	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN DAN PERAWATAN	8
1084	KEPALA SEKSI KEGIATAN KERJA	9
1085	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KERJA DAN PENGELOLAAN HASIL KERJA	8

1086	KEPALA SUBSEKSI SARANA KERJA	8
1087	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB	9
1088	KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN	8
1089	KEPALA SUBSEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB	8
1090	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB	12
1091	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN	9
1092	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
1093	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	8
1094	KEPALA URUSAN UMUM	8
1095	KEPALA SEKSI BIMBINGAN NAPI/ANAK DIDIK DAN KEGIATAN KERJA	9
1096	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI DAN BIMBINGAN KEMASYARAKATAN	8
1097	KEPALA SUBSEKSI PERAWATAN NAPI/ANAK DIDIK	8
1098	KEPALA SUBSEKSI KEGIATAN KERJA	8
1099	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB	9
1100	KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN	8
1101	KEPALA SUBSEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB	8
1102	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TERBUKA	12
1103	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN	9
1104	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
1105	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	8
1106	KEPALA URUSAN UMUM	8
1107	KEPALA SEKSI BIMBINGAN NAPI/ANAK DIDIK DAN KEGIATAN KERJA	9
1108	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI DAN BIMBINGAN KEMASYARAKATAN	8
1109	KEPALA SUBSEKSI PERAWATAN NAPI/ANAK DIDIK	8
1110	KEPALA SUBSEKSI KEGIATAN KERJA	8
1111	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB	9
1112	KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN	8
1113	KEPALA SUBSEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB	8
1114	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS III	10
1115	KEPALA URUSAN TATA USAHA	8
1116	KEPALA SUBSEKSI ADMISI DAN ORIENTASI	8
1117	KEPALA SUBSEKSI PEMBINAAN	8
1118	KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN	8
1119	KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I	12
1120	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN RUTAN	9
1121	KEPALA URUSAN TATA USAHA	8
1122	KEPALA SEKSI PELAYANAN TAHANAN	9
1123	KEPALA SUBSEKSI ADMINISTRASI DAN PERAWATAN	8
1124	KEPALA SUBSEKSI BANTUAN HUKUM DAN PENYULUHAN	8
1125	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEGIATAN	8
1126	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN RUTAN	9
1127	KEPALA SUBSEKSI KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	8
1128	KEPALA SUBSEKSI UMUM	8
1129	KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA	10
1130	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN RUTAN	8
1131	KEPALA SUBSEKSI PELAYANAN TAHANAN	8
1132	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEGIATAN	8
1133	KEPALA SUBSEKSI PENGELOLAAN RUTAN	8



1134	KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB	10
1135	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN RUTAN	8
1136	KEPALA SUBSEKSI PELAYANAN TAHANAN	8
1137	KEPALA SUBSEKSI PENGELOLAAN RUTAN	8
1138	KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I	12
1139	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
1140	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN	8
1141	KEPALA URUSAN KEUANGAN	8
1142	KEPALA URUSAN UMUM	8
1143	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KLIEN DEWASA	9
1144	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI	8
1145	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN	8
1146	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KERJA	8
1147	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KLIEN ANAK	9
1148	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI	8
1149	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN	8
1150	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KERJA	8
1151	KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II	10
1152	KEPALA URUSAN TATA USAHA	8
1153	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KLIEN DEWASA	8
1154	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KLIEN ANAK	8
1155	KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KLAS I	10
1156	KEPALA SUBSEKSI ADMINISTRASI DAN PEMELIHARAAN	8
1157	KEPALA SUBSEKSI PENGAMANAN DAN PENGELOLAAN RUPBASAN	8
1158	KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II	10
1159	KEPALA SUBSEKSI ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN RUPBASAN	8
1160	KEPALA CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA	10
1161	KEPALA SUBSEKSI PELAYANAN TAHANAN DAN PENGELOLAAN CABANG RUTAN	8
1162	KETUA BALAI HARTA PENINGGALAN	12
1163	SEKRETARIS BALAI HARTA PENINGGALAN	10
1164	KEPALA SEKSI HARTA PENINGGALAN WILAYAH I	9
1165	KEPALA SEKSI HARTA PENINGGALAN WILAYAH II	9
1166	KEPALA SEKSI HARTA PENINGGALAN WILAYAH III	9
1167	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
1168	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN	8
1169	KEPALA URUSAN KEUANGAN	8
1170	KEPALA URUSAN UMUM	8
1171	KEPALA URUSAN HARTA PENINGGALAN DAN KEPAILITAN	8
1172	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS	14
1173	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	11
1174	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM	9
1175	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN	9
1176	KEPALA BIDANG INFORMASI DAN SARANA KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	11
1177	KEPALA SEKSI INFORMASI KEIMIGRASIAN	9
1178	KEPALA SEKSI SARANA KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	9
1179	KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN STATUS KEIMIGRASIAN	11
1180	KEPALA SEKSI PERIZINAN KEIMIGRASIAN	9
1181	KEPALA SEKSI STATUS KEIMIGRASIAN	9

1182	KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	11
1183	KEPALA SEKSI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN	9
1184	KEPALA SEKSI PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	9
1185	KEPALA BIDANG PENDARATAN DAN IZIN MASUK	11
1186	KEPALA SEKSI UNIT A	10
1187	KEPALA SEKSI UNIT B	10
1188	KEPALA SEKSI UNIT C	10
1189	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I	12
1190	KEPALA SEKSI INFORMASI DAN SARANA KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	9
1191	KEPALA SUBSEKSI INFORMASI	8
1192	KEPALA SUBSEKSI KOMUNIKASI	8
1193	KEPALA SEKSI LALU LINTAS KEIMIGRASIAN	9
1194	KEPALA SUBSEKSI LINTAS BATAS	8
1195	KEPALA SUBSEKSI PERIZINAN KEIMIGRASIAN	8
1196	KEPALA SEKSI STATUS KEIMIGRASIAN	9
1197	KEPALA SUBSEKSI PENENTUAN STATUS KEIMIGRASIAN	8
1198	KEPALA SUBSEKSI PENELAAHAN STATUS KEIMIGRASIAN	8
1199	KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	9
1200	KEPALA SUBSEKSI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN	8
1201	KEPALA SUBSEKSI PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	8
1202	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
1203	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN	8
1204	KEPALA URUSAN KEUANGAN	8
1205	KEPALA URUSAN UMUM	8
1206	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II	11
1207	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
1208	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN	8
1209	KEPALA URUSAN KEUANGAN	8
1210	KEPALA URUSAN UMUM	8
1211	KEPALA SEKSI INFORMASI DAN SARANA KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	9
1212	KEPALA SUBSEKSI INFORMASI	8
1213	KEPALA SUBSEKSI KOMUNIKASI	8
1214	KEPALA SEKSI LALU LINTAS DAN STATUS KEIMIGRASIAN	9
1215	KEPALA SUBSEKSI LALU LINTAS KEIMIGRASIAN	8
1216	KEPALA SUBSEKSI STATUS KEIMIGRASIAN	8
1217	KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	9
1218	KEPALA SUBSEKSI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN	8
1219	KEPALA SUBSEKSI PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	8
1220	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS III	10
1221	KEPALA URUSAN TATA USAHA	8
1222	KEPALA SUBSEKSI LALU LINTAS DAN STATUS KEIMIGRASIAN	8
1223	KEPALA SUBSEKSI INSARKOM DAN WASDAK KEIMIGRASIAN	8
1224	KEPALA RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT	14
1225	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	11
1226	KEPALA SUBBAGIAN UMUM	9
1227	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN	9
1228	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN	9
1229	KEPALA BIDANG REGISTRASI DAN PERAWATAN	11
1230	KEPALA SEKSI REGISTRASI, ADMINISTRASI DAN PELAPORAN	9

1231	KEPALA SEKSI PERAWATAN	9
1232	KEPALA SEKSI KESEHATAN	9
1233	KEPALA BIDANG PENEMPATAN, KEAMANAN, PEMULANGAN DAN DEPORTASI	11
1234	KEPALA SEKSI PENEMPATAN	9
1235	KEPALA SEKSI KEAMANAN	9
1236	KEPALA SEKSI PEMULANGAN DAN DEPORTASI	9
1237	KEPALA RUMAH DETENSI IMIGRASI	12
1238	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
1239	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN	8
1240	KEPALA URUSAN KEUANGAN	8
1241	KEPALA URUSAN UMUM	8
1242	KEPALA SEKSI REGISTRASI, ADMINISTRASI DAN PELAPORAN	9
1243	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI	8
1244	KEPALA SUBSEKSI ADMINISTRASI DAN PELAPORAN	8
1245	KEPALA SEKSI PERAWATAN DAN KESEHATAN	9
1246	KEPALA SUBSEKSI PERAWATAN	8
1247	KEPALA SUBSEKSI KESEHATAN	8
1248	KEPALA SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN	9
1249	KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN	8
1250	KEPALA SUBSEKSI KETERTIBAN	8
1251	KEPALA RUMAH SAKIT	12
1252	KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	9
1253	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	9

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 7 TENTANG  
 KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM  
 DAN HAK ASASI MANUSIA

DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAN KELAS JABATAN  
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	PERANCANG PERATURAN PERUU	
	PERANCANG PERATURAN PERUU PERTAMA	8
	PERANCANG PERATURAN PERUU MUDA	9
	PERANCANG PERATURAN PERUU MADYA	11
	PERANCANG PERATURAN PERUU UTAMA	13
2	PEMERIKSA PATEN AHLI	
	PEMERIKSA PATEN PERTAMA	8
	PEMERIKSA PATEN MUDA	9
	PEMERIKSA PATEN MADYA	11
	PEMERIKSA PATEN UTAMA	13
3	PEMERIKSA MERK AHLI	
	PEMERIKSA MERK PERTAMA	8
	PEMERIKSA MERK MUDA	9
	PEMERIKSA MERK MADYA	11
	PEMERIKSA MERK UTAMA	13
4	PEMERIKSA MERK TERAMPIL	
	PEMERIKSA MERK PELAKSANA	6
	PEMERIKSA MERK PELAKSANA LANJUTAN	7
	PEMERIKSA MERK PENYELIA	8
5	DOKTER/SPELIALIS	
	DOKTER PERTAMA	8
	DOKTER MUDA	9
	DOKTER MADYA	11
	DOKTER UTAMA	13
6	DOKTER GIGI/SPELIALIS	
	DOKTER GIGI PERTAMA	8
	DOKTER GIGI MUDA	9
	DOKTER GIGI MADYA	11
	DOKTER GIGI UTAMA	13
7	PERAWAT GIGI	
	PERAWAT GIGI PEMULA	5
	PERAWAT GIGI PELAKSANA	6
	PERAWAT GIGI PELAKSANA LANJUTAN	7
	PERAWAT GIGI PENYELIA	8

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
8	PERAWAT AHLI	
	PERAWAT PERTAMA	8
	PERAWAT MUDA	9
	PERAWAT MADYA	11
9	PERAWAT UTAMA	13
	PERAWAT TERAMPIL	
	PERAWAT PEMULA	5
	PERAWAT PELAKSANA	6
10	PERAWAT PELAKSANA LANJUTAN	7
	PERAWAT PENYELIA	8
	ARSIPARIS AHLI	
	ARSIPARIS PERTAMA	8
11	ARSIPARIS MUDA	9
	ARSIPARIS MADYA	11
	ARSIPARIS UTAMA	13
	ARSIPARIS TERAMPIL	
12	ARSIPARIS PELAKSANA	6
	ARSIPARIS PELAKSANA LANJUTAN	7
	ARSIPARIS PENYELIA	8
	PUSTAKAWAN AHLI	
13	PUSTAKAWAN PERTAMA	8
	PUSTAKAWAN MUDA	9
	PUSTAKAWAN MADYA	11
	PUSTAKAWAN UTAMA	13
14	PUSTAKAWAN TERAMPIL	
	PUSTAKAWAN PELAKSANA	6
	PUSTAKAWAN PELAKSANA LANJUTAN	7
	PUSTAKAWAN PENYELIA	8
15	WIDYAISARA	
	WIDYAISARA PERTAMA	8
	WIDYAISARA MUDA	9
	WIDYAISARA MADYA	11
16	WIDYAISARA UTAMA	13
	PENELITI	
	PENELITI PERTAMA	8
	PENELITI MUDA	9
17	PPENELITI MADYA	11
	PENELITI UTAMA	13
	AUDITOR AHLI	
	AUDITOR PERTAMA	8
18	AUDITOR MUDA	9
	AUDITOR MADYA	11
	AUDITOR UTAMA	13
	AUDITOR TERAMPIL	
19	AUDITOR PELAKSANA	6
	AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN	7
	AUDITOR PENYELIA	8
	PRANATA KOMPUTER AHLI	
20	PRANATA KOMPUTER PERTAMA	8
	PRANATA KOMPUTER MUDA	9
	PRANATA KOMPUTER MADYA	11
	PRANATA KOMPUTER UTAMA	13
21	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	
	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA	6
	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA LANJUTAN	7

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
	PRANATA KOMPUTER PENYELIA	8
20	ANALIS KEPEGAWAIAN TERAMPIL	
	ANALIS KEPEGAWAIAN PELAKSANA	6
	ANALIS KEPEGAWAIAN PELAKSANA LANJUTAN	7
	ANALIS KEPEGAWAIAN PENYELIA	8
21	ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI	
	ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA	8
	ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA	9
	ANALIS KEPEGAWAIAN MADYA	11
	ANALIS KEPEGAWAIAN UTAMA	13
22	PSIKOLOG KLINIS AHLI	
	PSIKOLOG KLINIS PERTAMA	8
	PSIKOLOG KLINIS MUDA	9
	PSIKOLOG KLINIS MADYA	11
	PSIKOLOG KLINIS UTAMA	13
23	PENERJEMAH AHLI	
	PENERJEMAH PERTAMA	8
	PENERJEMAH MUDA	9
	PENERJEMAH MADYA	11
	PENERJEMAH UTAMA	13
24	PERENCANA AHLI	
	PERENCANA PERTAMA	8
	PERENCANA MUDA	9
	PERENCANA MADYA	11
	PERENCANA UTAMA	13
25	APOTEKER AHLI	
	APOTEKER PERTAMA	8
	APOTEKER MUDA	9
	APOTEKER MADYA	11
	APOTEKER UTAMA	13
26	ASISTEN APOTEKER	
	ASISTEN APOTEKER PELAKSANA PEMULA	5
	ASISTEN APOTEKER PELAKSANA	6
	ASISTEN APOTEKER PELAKSANA LANJUTAN	7
	ASISTEN APOTEKER PENYELIA	8
27	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI	
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PERTAMA	8
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN MUDA	9
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN MADYA	11
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN UTAMA	13
28	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PELAKSANA PEMULA	5
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PELAKSANA	6
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN LANJUTAN	7
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PENYELIA	8
29	FISIOTERAPIS AHLI	
	FISIOTERAPIS PERTAMA	8
	FISIOTERAPIS MUDA	9
	FISIOTERAPIS MADYA	11
	FISIOTERAPIS UTAMA	13
30	FISIOTERAPIS TERAMPIL	
	FISIOTERAPIS PELAKSANA	5
	FISIOTERAPIS PELAKSANA LANJUTAN	7
	FISIOTERAPIS PENYELIA	8
31	RADIOGRAFER TERAMPIL	

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
	RADIOGRAFER PELAKSANA	6
	RADIOGRAFER PELAKSANA LANJUTAN	7
	RADIOGRAFER PENYELIA	8
32	PEREKAM MEDIS	
	PEREKAM MEDIS PELAKSANA	6
	PEREKAM MEDIS PELAKSANA LANJUTAN	7
	PEREKAM MEDIS PENYELIA	8
33	NUTRISIONIS AHLI	
	NUTRISIONIS PERTAMA	8
	NUTRISIONIS MUDA	9
	NUTRISIONIS MADYA	11
	NUTRISIONIS UTAMA	13
34	NUTRISIONIS TERAMPIL	
	NUTRISIONIS PELAKSANA	6
	NUTRISIONIS PELAKSANA LANJUTAN	7
	NUTRISIONIS PENYELIA	8
35	ADMINISTRATOR KESEHATAN	
	ADMINISTRATOR PERTAMA	8
	ADMINISTRATOR MUDA	9
	ADMINISTRATOR MADYA	11
	ADMINISTRATOR UTAMA	13
36	PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI	
	PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI PERTAMA	8
	PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI MUDA	9
	PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI MADYA	11
	PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI UTAMA	13
37	BIDAN AHLI	
	BIDAN PERTAMA	8
	BIDAN MUDA	9
	BIDAN MADYA	11
	BIDAN UTAMA	13
38	BIDAN TERAMPIL	
	BIDAN PELAKSANA PEMULA	5
	BIDAN PELAKSANA	6
	BIDAN PELAKSANA LANJUTAN	7
	BIDAN PENYELIA	8
39	PENYIDIK PPNS	
	PENYIDIK PPNS PERTAMA	8
	PENYIDIK PPNS MUDA	9
	PENYIDIK PPNS MADYA	11
	PENYIDIK PPNS UTAMA	13

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 7 TENTANG  
 KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM  
 DAN HAK ASASI MANUSIA

DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL UMUM DAN JABATAN LAINNYA  
 SERTA KELAS JABATAN  
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN
STAF AHLI DAN STAF KHUSUS MENTERI		
1	STAF AHLI BIDANG HUKUM LINGKUNGAN DAN PERTANAHAN	16
2	STAF AHLI BIDANG PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA	16
3	STAF AHLI BIDANG PENGEMBANGAN BUDAYA HUKUM	16
4	STAF AHLI BIDANG PEREKONOMIAN DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI	16
5	STAF AHLI BIDANG POLITIK SOSIAL DAN KEAMANAN	16
6	STAF KHUSUS MENTERI	15
ANGGOTA TEKNIS BHP		
	ANGGOTA TEKNIS HUKUM	10
FUNGSIONAL UMUM		
1	BENDAHARA PENGELUARAN PUSAT	8
2	BENDAHARA PENERIMAAN PUSAT	8
3	ANALIS EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7
4	ANALIS JABATAN	7
5	ANALIS KEBUTUHAN DAN MANFAAT PELATIHAN	7
6	ANALIS KEIMIGRASIAN	7
7	ANALIS KELEMBAGAAN	7
8	ANALIS KONSEPSI, PRAKARSA DAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7
9	ANALIS PENDAPAT HUKUM DAN ADVOKASI	7
10	ANALIS PENGADUAN MASYARAKAT	7
11	ANALIS PENGEMBANGAN HUKUM	7
12	ANALIS PENGEMBANGAN PEGAWAI	7
13	ANALIS PENYELESAIAN PEWARGANEGARAAN	7
14	ANALIS PERATURAN DAERAH	7
15	ANALIS PERENCANAAN, PENGGUNAAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA	7



16	ANALIS PERJANJIAN KERJA SAMA	7
17	ANALIS PERMASALAHAN HAM	7
18	ANALIS PERMASALAHAN HUKUM	7
19	ANALIS PERMOHONAN DESAIN INDUSTRI	7
20	ANALIS PERMOHONAN PENDAPAT HUKUM	7
21	ANALIS PERTIMBANGAN BANTUAN HUKUM	7
22	ANALIS PERTIMBANGAN EKSTRADISI	7
23	ANALIS PERTIMBANGAN HUKUM	7
24	ANALIS PROGRAM BIMBINGAN	7
25	ANALIS RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7
26	ANALIS SIDIK JARI	7
27	ANALIS SISTEM APLIKASI DAN JARINGAN KOMPUTER	7
28	ANALIS SISTEM PROSEDUR DAN METODE KERJA	7
29	ANALIS STANDARISASI SARANA KERJA	7
30	BENDAHARA PENERIMAAN SATKER	7
31	BENDAHARAN PENGELUARAN SATKER	7
32	NAHKODA	7
33	PEMBIMBING KEMASYARAKATAN	7
34	PEMROSES PERMOHONAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	7
35	PEMROSES STATUS KEWARGANEGARAAN RI	7
36	PENELAHAH DOKUMEN FISIK PERSEROAN	7
37	PENELAHAH RANCANGAN PERJANJIAN EKSTRADISI	7
38	PENELAHAH STATUS WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN	7
39	PENERJEMAHAN BAHAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7
40	PENGEVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN	7
41	PENYULUH HUKUM/HAM	7
42	PENYUSUN ABSTRAKSI HUKUM	7
43	PENYUSUN INFORMASI HUKUM	7
44	PENYUSUN KONSEP KETERANGAN PEMERINTAH	7
45	PENYUSUN LAPORAN DAN HASIL EVALUASI	7
46	PENYUSUN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN	7
47	PENYUSUN LAPORAN PENGAWASAN	7
48	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	7
49	PENYUSUN MATERI BIMBINGAN DAN KONSULTASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH	7
50	PENYUSUN MATERI PENGHARMONISASIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7
51	PENYUSUN MATERI KEBIJAKAN	7
52	PENYUSUN NASKAH AKADEMIK	7
53	PENYUSUN PROGRAM	7
54	PENYUSUN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN	7
55	PENYUSUN TINDAK LANJUT DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN	7
56	PENYUSUN BAHAN KERJA SAMA	7
57	DOKUMENTALIS HUKUM	6
58	KOMANDAN JAGA PEMASYARAKATAN/KEIMIGRASIAN	6
59	PEMERIKSA KEIMIGRASIAN	6
60	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	6
61	PENGELOLA ARSIP KEPEGAWAIAN	6
62	PENGELOLA BANTUAN HUKUM	6

63	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6
64	PENGELOLA BASAN/BARAN	6
65	PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	6
66	PENGELOLA DATA PENGHARMONISASIAN	6
67	PENGELOLA HASIL KERJA	6
68	PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI	6
69	PENGELOLA KEUANGAN	6
70	PENGELOLA PEMBIMBINGAN KEMANDIRIAN	6
71	PENGELOLA PEMBINAAN INTELEKTUAL	6
72	PENGELOLA PEMBINAAN KEMANDIRIAN	6
73	PENGELOLA PEMBINAAN KEPRIBADIAN	6
74	PENGELOLA PEMBINAAN ROHANI	6
75	PENGELOLA PENERBITAN JURNAL LEGISLASI INDONESIA	6
76	REGISTRATOR PEMASYARAKATAN	6
77	PENGELOLA RUMAH DETENSI	6
78	PENGELOLA SARANA KERJA	6
79	PENGELOLA SISTEM DATABASE PEMASYARAKATAN	6
80	PENGELOLA PENSIUN/PEMBERHENTIAN PNS	6
81	PENGELOLA WEBSITE	6
82	PENGEVALUASI KEGIATAN PROGRAM	6
83	PENGOLAH APLIKASI SISTEM INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6
84	PENGOLAH BAHAN DISTRIBUSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6
85	PENGOLAH BAHAN EVALUASI DAN DOKUMENTASI EKSTRADISI	6
86	PENGOLAH BAHAN EVALUASI DAN PELAPORAN	6
87	PENGOLAH BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI	6
88	PENGOLAH BAHAN PENGKAJIAN DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6
89	PENGOLAH BAHAN PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN	6
90	PENGOLAH DAN PENYUSUN BAHAN BIMBINGAN TEKNIS HAM	6
91	PENGOLAH DAN PENYUSUN DATA FASILITATOR BIMBINGAN TEKNIS HAM	6
92	PENGOLAH DAN PENYUSUN DATA PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT	6
93	PENGOLAH DATA ADMINISTRASI KOMISI BANDING	6
94	PENGOLAH DATA ANGGARAN	6
95	PENGOLAH DATA APLIKASI DAN DATABASE	6
96	PENGOLAH DATA DAKTILOSKOPI	6
97	PENGOLAH DATA DAN BAHAN PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	6
98	PENGOLAH DATA DAN DOKUMENTASI HUKUM INTERNASIONAL UMUM	6
99	PENGOLAH DATA DISEMINASI HAM	6
100	PENGOLAH DATA EVALUASI DAN INFORMASI	6
101	PENGOLAH DAN PENYUSUN EVALUASI DAN PENGEMBANGAN BIMBINGAN TEKNIS	6
102	PENGOLAH DATA HARTA PENINGGALAN	6
103	PENGOLAH DATA HASIL LAPORAN VERIFIKASI	6
104	PENGOLAH DATA HASIL PENELITIAN	6

105	PENGOLAH DATA HASIL PERTIMBANGAN DAN PENILAIAN PERLENGKAPAN	6
106	PENGOLAH DATA INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG	6
107	PENGOLAH DATA INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI	6
108	PENGOLAH DATA KEGIATAN ANTAR BADAN INTERNASIONAL	6
109	PENGOLAH DATA KEGIATAN RENCANA, PROGRAM DAN ANGGARAN	6
110	PENGOLAH DATA KELEMBAGAAN	6
111	PENGOLAH DATA KERJASAMA	6
112	PENGOLAH DATA KESEHATAN	6
113	PENGOLAH DATA KLASIFIKASI DESAIN INDUSTRI	6
114	PENGOLAH DATA KLASIFIKASI KELAS BARANG	6
115	PENGOLAH DATA KOMPILASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MASALAH DAN KASUS	6
116	PENGOLAH DATA KOVENAN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	6
117	PENGOLAH DATA KOVENAN HAK SIPIL DAN POLITIK	6
118	PENGOLAH DATA LAPORAN	6
119	PENGOLAH DATA LAPORAN ANALISA KEBUTUHAN DAN PEMBAKUAN PERLENGKAPAN	6
120	PENGOLAH DATA LAPORAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	6
121	PENGOLAH DATA LAPORAN HAK-HAK KELOMPOK RENTAN	6
122	PENGOLAH DATA LAPORAN HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK	6
123	PENGOLAH DATA LAPORAN HAM YANG BERAT	6
124	PENGOLAH DATA LAPORAN HASIL PENYALURAN PERLENGKAPAN	6
125	PENGOLAH DATA LAPORAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN	6
126	PENGOLAH DATA LAPORAN MATERI INFORMASI	6
127	PENGOLAH DATA LAPORAN METODOLOGI DISEMINASI HAM	6
128	PENGOLAH DATA LAPORAN PENILAIAN PERBENDAHARAAN	6
129	PENGOLAH DATA LAPORAN PRODUKSI DAN INFORMASI	6
130	PENGOLAH DATA LAPORAN SISTEM APLIKASI DAN DATABASE	6
131	PENGOLAH DATA PENGEMBANGAN JARINGAN BIMBINGAN TEKNIS HAM	6
132	PENGOLAH DATA PERENCANAAN DAN PROGRAM	6
133	PENGOLAH DATA WASIAT	6
134	PENGOLAH SAI	6
135	PENYUSUN BAHAN KOORDINASI DAN MONITORING PERSIDANGAN	6
136	PENYUSUN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA	6
137	ROHANIAWAN AGAMA/PEMBIMBING AGAMA	6
138	SEKRETARIS PIMPINAN	6
139	TEKNISI JARINGAN	6
140	VERIFIKATOR	6

141	OPERATOR KOMPUTER	5
142	PEMBAUT DAFTAR GAJI	5
143	PEMELIHARA KANTOR	5
144	PEMERIKSA PELANGGARAN TATA TERTIB	5
145	PEMROSES BERKAS PERMOHONAN HARTA PENINGGALAN	5
146	PEMROSES DATA PENYIDIKAN DAN LITIGASI	5
147	PEMROSES IZIN ADVOKAT ASING	5
148	PEMROSES JAMINAN SOSIAL	5
149	PEMROSES LAYANAN HUKUM UMUM	5
150	PEMROSES LEGALISASI	5
151	PEMROSES MUTASI KEPEGAWAIAN	5
152	PEMROSES PENETAPAN PENGHAPUSAN PERLENGKAPAN	5
153	PEMROSES PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI	5
154	PEMROSES PENGEMBANGAN METODE PENYULUHAN HUKUM	5
155	PEMROSES PENYELESAIAN SENGKETA, LITIGASI DAN PENYIDIKAN	5
156	PEMROSES URUSAN ADMINISTRASI KOMISI BANDING	5
157	PEMROSES PENETAPAN PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN	5
158	PENATAUSAHAAN	5
159	PENGADMINISTRASI BARANG DAN ATK	5
160	PENGADMINISTRASI BARANG MILIK NEGARA	5
161	PENGADMINISTRASI DATA PERMOHONAN PENDAPAT HUKUM	5
162	PENGADMINISTRASI JAMINAN FIDUSIA	5
163	PENGADMINISTRASI KEBUTUHAN DAN PEMBAKUAN PERLENGKAPAN	5
164	PENGADMINISTRASI LAYANAN KUNJUNGAN	5
165	PENGADMINISTRASI MANAJEMEN OUTSOURCING TEKNOLOGI INFORMASI	5
166	PENGADMINISTRASI PERJALANAN DINAS	5
167	PENGADMINISTRASI PERLENGKAPAN KEAMANAN	5
168	PENGADMINISTRASI PERPUSTAKAAN	5
169	PENGADMINISTRASI UMUM	5
170	PENGADMINISTRASI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	5
171	PENGAMBIL SIDIK JARI	5
172	PENGAWAL TAHANAN/NARAPIDANA	5
173	PENGELOLA ADMINISTRASI DIKLAT	5
174	PENGELOLA DAN PENGOLAH MAKANAN	5
175	PENGELOLA HASIL BELAJAR/EVALUASI PESERTA DIKLAT/PELATIHAN	5
176	PENGELOLA HUKUMAN DISIPLIN	5
177	PENGELOLA KENDARAAN DINAS	5
178	PENGELOLA TATA NASKAH	5
179	PENGHIMPUN BERITA	5
180	PENGHUBUNG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5
181	PENGHUBUNG ANTAR LEMBAGA	5
182	PENGOLAH ADMINISTRASI PIMPINAN	5
183	PENGOLAH ARSIP DAN DOKUMENTASI	5

184	PENGOLAH ARSIP TERAPAN	5
185	PENGOLAH DATA GAJI PEGAWAI	5
186	PENGOLAH DATA INVENTARIS	5
187	PENGOLAH DATA KEGIATAN PENGAMANAN	5
188	PENGOLAH DATA KENDARAAN OPERASIONAL	5
189	PENGOLAH DATA LAPORAN PEMBUKUAN	5
190	PENGOLAH DATA LAPORAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN	5
191	PENGOLAH DATA LAPORAN PENGIRIMAN DAN PENGANGKUTAN PERLENGKAPAN	5
192	PENGOLAH DATA SIDIK JARI	5
193	PENJAGA PINTU UTAMA PEMASYARAKATAN	5
194	PENYIAP BAHAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5
195	PENYIAP BAHAN BIMBINGAN DAN KONSULTASI PERANCANG PERATURAN DAERAH	5
196	PENYIAP BAHAN DISTRIBUSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5
197	PENYIAP BAHAN HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5
198	PENYIAP BAHAN HUKUM TIDAK TERTULIS	5
199	PENYIAP BAHAN LAPORAN DAN EVALUASI	5
200	PENYIAP BAHAN LAPORAN HASIL PERTEMUAN ILMIAH	5
201	PENYIAP BAHAN LEGALISASI	5
202	PENYIAP BAHAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI	5
203	PENYIAP BAHAN PEMBELAJARAN	5
204	PENYIAP BAHAN PENELITIAN HUKUM	5
205	PENYIAP BAHAN PENETAPAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL	5
206	PENYIAP BAHAN PENGEMBANGAN JARINGAN INFORMASI HUKUM	5
207	PENYIAP BAHAN PENGEMBANGAN METODE PENYULUHAN HUKUM	5
208	PENYIAP BAHAN PENGEMBANGAN OTOMASI	5
209	PENYIAP BAHAN PENGKAJIAN HUKUM	5
210	PENYIAP BAHAN PENYELENGGARA DIKLAT/PELATIHAN/PENYULUHAN	5
211	PENYIAP BAHAN PUBLIKASI	5
212	PENYIAP BAHAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5
213	PENYIAP DATA DAN BAHAN PENGHARMONISASIAN	5
214	PENYIAP DATA DAN PROGRAM LEGISLASI	5
215	PENYIAP DATA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN	5
216	PENYIAP DOKUMENTASI NASKAH PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5
217	PENYIAP BAHAN KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM	5
218	PENYUSUN ARSIP DAN DOKUMENTASI	5
219	PETUGAS DOKUMENTASI (FOTOGRAFER)	5
220	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	5
221	PETUGAS PENGAMANAN DETENI	5
222	PETUGAS PROTOKOL	5
223	POLISI KHUSUS KEIMIGRASIAN/PEMASYARAKATAN	5
224	SATUAN PENGAMAN TAHANAN/NARAPIDANA	5
225	TEKNISI	5

226	PENGELOLA KELENGKAPAN DAN PERAWATAN NARAPIDANA/TAHANAN	4
227	OPERATOR MESIN	4
228	OPERATOR TELEPON	4
229	PRAMU ACARA	4
230	TARUNA AKADEMI	4
231	PENGEMUDI	3
232	AGENDARIS	3
233	PETUGAS PENGGANDAAN	3
234	CARAKA	3

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN